

ABSTRAK

Arizal Tom Liwafa (02659220025)

PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI YANG TIDAK DIDAKWA DALAM SURAT DAKWAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM (63 halaman, 0 gambar, 0 tabel)

Korporasi sebagai subjek hukum sudah diakui dan diatur dalam undang-undang khusus yang berada diluar KUHP. Sebagai subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana dengan orang perseorangan atau *natuurlijk person* untuk meminta pertanggungjawaban pidana perlu untuk ditentukan mengenai mekanisme pemidanaannya sebagaimana diatur dalam hukum acara yakni mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012 telah mengesampingkan prosedur hukum acara dengan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap korporasi yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat yang menguraikan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dan berfungsi sebagai dasar bagi Terdakwa untuk mengajukan pembelaan, serta merupakan landasan dan titik tolak bagi Hakim dalam memeriksa perkara disidang pengadilan. Permasalahannya adalah bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporaasi sebagai pelaku tindak pidana, serta bagaimana putusan pemidanaan terhadap korporasi yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian legal research, serta untuk memperoleh pemecahan masalah menggunakan metode statute approach, conceptual approach dan case approach. Berdasarkan pembahasan tersebut menunjukkan bahwa putusan pemidanaan terhadap korporasi yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan telah mengesampingkan prosedur hukum acara sehingga dianggap tidak sesuai dengan kepastian hukum. Serta putusan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sahnya putusan sehingga akibat hukumnya putusan tersebut batal demi hukum (*nietig*) yang artinya putusan tersebut dianggap tidak pernah ada atau setidaknya tidak dapat dilaksanakan (*non executable*).

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Putusan Pemidanaan, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Arizal Tom Liwafa (02659220025)

THE DECISION OF PUNISHMENT ON CORPORATIONS WHO ARE NOT DEFENDANTS IN THE INDICTMENT REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY THEORY

Corporation as a legal subject have been recognized and regulated in separate laws besides the Criminal Code (KUHP). As a subject of law, corporation committing crime could have criminal liability. As with individual persons or natuurlijke persoon to be liable to criminal liability, it is necessary to determine the mechanism of punishment as stipulated in procedural law, starting from the stage of investigation, prosecution, and trial. The decision of the Supreme Court Number 2239K/Pid.Sus/2012 has ruled out procedural law by imposing a sentence on corporations who are not defendants in the indictment. The indictment is a letter describing the crime that was charged to the defendant, as the basis and starting point for the Judge in examining cases in court. he problem is how about criminal liability against corporations as perpetrators of crimes, as well as how the conviction of corporations who are not defendants in the indictment. Research in this thesis uses a type of legal research and to obtain problem solving using the statute approach, conceptual approach and case approach. Based on the discussion, it shows that the conviction of corporations that are not defendants in the indictment has ruled out procedural law so that it is deemed inconsistent with legal certainty. However, this is based on substantive justice and is supported by legal arguments that can be justified by using the theory of vicarious liability. As well as the principle of the freedom of judge in deciding. Key words: Corporation Criminal Liability, Criminal Decision, Freedom of Judge

